## KARIMUN DAN BINTAN ZONA KUNING PELAYANAN PUBLIK

## Senin, 31 Desember 2018 - Agung Setio Apriyanto

Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menilai Kabupaten Karimun dan Bintan masuk dalam zona kuning dalam hal pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman perwakilan Provinsi Kepri, Arif Budiman, di Batam, Senin, mengatakan meski masih berada di zona kuning kedua kabupaten tersebut sebenarnya sudah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan.

"Sebenarnya Kabupaten Karimun dan Bintan sudah lebih baik dari tahun lalu, karena sebelumnya mereka masuk dalam zona merah," katanya.

Arif menjelaskan untuk Pemkot Batam, Tanjungpinang dan Provinsi Kepri sudah berada di zona hijau. Dalam artian pelayanan publik yang diberikan sudah sangat baik.

Pada 2017 lanjutnya, Pemkot Batam, Tanjungpinang dan Provinsi berada di zona kuning.

"Tahun ini semua penilaiannya jauh lebih, bahkan Provinsi Kepri mendapatkan nilai terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Namun kata Arif, pihaknya akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh kabupaten di Provinsi Kepri agar mendapatkan hasil penilaian kepatuhan di zona hijau.

"Kita ingin semuanya mendapatkan penilaian di zona hijau dan tahun depan kita akan mulai melakukan bimbingan untuk Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas," paparnya.

Kata Arif, pihaknya baru dapat melakukan bimbingan teknis kepada OPD di Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas di 2019 karena keterbatasan anggaran di 2018.

"Selain itu kemarin cuma ada lima anggota dan sekarang sudah ada tambahan menjadi delapan, sehingga kita bisa memberikan bimbingan ke sana (Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas)," jelasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Siadari, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

"Penilaian kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009," katanya.

